



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Cool Japan Initiative* sebagai Diplomasi Budaya Jepang untuk
Mempererat Hubungan Diplomatik dengan
Tiongkok selama Sengketa Kepulauan Senkaku (2012-2018)**

Skripsi

Oleh
Katherine Agatha Agape
6091801207

Pembimbing
Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol

Bandung
2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Cool Japan Initiative as Japan's Cultural Diplomacy to Strengthen
Diplomatic Relations with China during the Senkaku Islands Dispute
(2012-2018)***

Skripsi

Oleh
Katherine Agatha Agape
6091801207

Pembimbing
Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol

Bandung
2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Katherine Agatha Agape
Nomor Pokok : 6091801207
Judul : *Cool Japan Initiative* sebagai Diplomasi Budaya Jepang untuk Mempererat Hubungan Diplomatik dengan Tiongkok selama Sengketa Kepulauan Senkaku (2012-2018)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 23 Juni 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Anggia Valerisha, S.IP., M.Si

: 

Sekretaris

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol

: 

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Katherine Agatha Agape

NPM : 6091801207

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : *Cool Japan Initiative* sebagai Diplomasi Budaya Jepang untuk Mempererat Hubungan Diplomatik dengan Tiongkok selama Sengketa Kepulauan Senkaku (2012-2018)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Juni 2022



Katherine Agatha Agape

ABSTRAK

Nama : Katherine Agatha Agape
NPM : 6091801207
Judul : *Cool Japan Initiative* sebagai Diplomasi Budaya Jepang untuk Mempererat Hubungan Diplomatik dengan Tiongkok selama Sengketa Kepulauan Senkaku (2012-2018)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesadaran Jepang tentang pentingnya budaya setelah zaman pendudukan dan penjajahan, sehingga mempengaruhi adanya transformasi budaya yang memanfaatkan diplomasi budaya demi mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu negara yang terpengaruhi oleh transformasi budaya Jepang untuk memanfaatkan diplomasi budaya melalui *Cool Japan Initiative* adalah Tiongkok. Namun, pengaplikasian *Cool Japan Initiative* kurang sesuai dengan rencananya ketika dihadapkan dengan sengketa kepulauan Senkaku. Jepang justru memanfaatkan program tersebut untuk mempererat hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti membuat pertanyaan penelitian yaitu, “Bagaimana diplomasi budaya Jepang melalui *Cool Japan Initiative* mempengaruhi hubungan diplomatik Jepang dan Tiongkok selama sengketa kepulauan Senkaku?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan konsep diplomasi budaya yang merupakan turunan dari diplomasi publik, serta konsep *internal balancing* dari konsep *balance of power* dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa diplomasi budaya Jepang melalui *Cool Japan initiative* mempererat hubungan diplomatik Jepang dan Tiongkok selama sengketa kepulauan Senkaku, meskipun rencananya kurang sesuai dengan pengaplikasiannya akibat pemanfaatan *internal balancing* dan *soft power* Jepang terhadap Tiongkok sebagai negara *rising power*.

Kata Kunci: Diplomasi Budaya, *Cool Japan Initiative*, *Soft Power*, Hubungan Diplomatik, Sengketa Kepulauan Senkaku, Jepang, Tiongkok

ABSTRACT

Name : Katherine Agatha Agape
Student Number : 6091801207
Title : *Cool Japan Initiative as Japan's Cultural Diplomacy to Strengthen Diplomatic Relations with China during the Senkaku Islands Dispute (2012-2018)*

This research introduced Japan's awareness regarding the importance of culture and influenced a cultural transformation within Japan by utilizing cultural diplomacy to achieve its national interests after the era of occupation and colonization. One of the countries that are affected by Japan's cultural transformation in utilizing cultural diplomacy through the Cool Japan Initiative is China. However, the application of the Cool Japan Initiative did not go according to plan when faced with the Senkaku Islands dispute. Japan took advantage of the program to strengthen its diplomatic relations with China. Based on this statement, the researcher made a research question, namely, "How did Japanese cultural diplomacy through the Cool Japan Initiative affect the diplomatic relationship between Japan and China during the Senkaku Islands dispute?". To answer this question, the researcher uses the concept of cultural diplomacy which is a derivative of public diplomacy, as well as the concept of internal balancing from the concept of balance of power with a qualitative method through the case study approach. Based on the research that has been done, the author concludes that Japanese cultural diplomacy through the Cool Japan Initiative has strengthened diplomatic relations between Japan and China during the Senkaku Islands dispute, although the plan was not in accordance with its application due to the use of Japan's internal balancing and soft power against China as a rising power country.

Keywords: Cultural Diplomacy, Cool Japan Initiative, Soft Power, Diplomatic Relations, Senkaku Islands Dispute, Japan, China

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan penulis untuk memenuhi syarat kelulusan program pendidikan strata-1 program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Diplomasi budaya Jepang melalui *Cool Japan Initiative* merupakan keunggulan yang dimanfaatkan untuk mempererat hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok. Dengan berkembangnya pemanfaatan diplomasi budaya sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan, ilmu hubungan internasional tidak selalu bersangkut paut dengan isu-isu konservatif yang pada umumnya didorong oleh strategi tradisional suatu negara untuk merespon ancaman militer. Melalui *Cool Japan Initiative* sebagai diplomasi budaya, Jepang dapat mempererat hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok selama sengketa kepulauan Senkaku sejak tahun 2012 hingga 2018.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tetap memiliki kekurangan akibat keterbatasan ilmu, kemampuan, dan sarana yang dimiliki. Penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran dari semua pihak karena merupakan sesuatu yang berharga bagi penulis untuk melengkapi penelitian ini dalam hal substansi maupun teknis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi.

Pertama, penulis ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing penelitian ini, Mbak Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol dari Universitas Katolik Parahyangan atas bimbingannya, serta kritik dan saran yang selalu diberikan tepat waktu, meskipun beliau memiliki tanggung jawab lainnya sebagai dosen. Kedua, penulis ingin berterima kasih kepada orang tua dan adik penulis, beserta dengan keluarga besar Al Athrus dan Panggabean atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

Ketiga, penulis ingin berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, terutama Afifah Fathiqah dan Aldrianov Ramadheen atas banyaknya diskusi terkait skripsi, serta topik keseharian lainnya yang secara tidak langsung memberikan penulis motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi. Penulis juga ingin berterima kasih kepada Ruben Manik karena telah banyak membantu penulis dalam menggunakan diksi dengan baik untuk penulisan skripsi dan senantiasa selalu ikhlas untuk berbagi ilmu terkait hubungan internasional setiap saat kami berdiskusi bersama. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada teman-teman di kampung halaman, terutama Alia Azzahra, Janardana Putri, dan Sylvia Edeline yang senantiasa selalu mendukung dan menyertai penulis dari kejauhan tanpa pamrih selama proses penulisan skripsi. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Merry Brigita atas bantuannya untuk menerjemahkan dokumen bahasa Jepang ke Bahasa Inggris dan atau Bahasa Indonesia agar penelitian ini dapat dikaji dengan lebih baik tanpa dibatasi oleh bahasa.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang tertarik dengan hubungan internasional dan pemanfaatan diplomasi budaya untuk mempererat hubungan diplomatik antara satu negara dengan yang lainnya.

Bandung, Juni 2022



Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	8
1.2.3 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian	11
1.4 Kajian Literatur	12
1.5 Kerangka Pemikiran	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.1 Metode Penelitian	21
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	23
1.7 Sistematika Pembahasan	25
BAB II HUBUNGAN DIPLOMATIK JEPANG-TIONGKOK YANG DINAMIS SEJAK TAHUN 2012 HINGGA 2018	27

2.1 Kepentingan Nasional Jepang terhadap Hubungan Diplomatik dengan Tiongkok sejak Tahun 2012 hingga 2018	28
2.2 Perkembangan Hubungan Diplomatik Jepang-Tiongkok yang Dinamis di sejak Tahun 2012 hingga 2018	34
2.2.1 Pergantian Masa Kepemimpinan Jepang di bawah Perdana Menteri Shinzō Abe	40
2.2.2 Pandangan Anti-Jepang oleh Tiongkok terhadap Jepang selama Sengketa Kepulauan Senkaku	43
2.2.3 Pandangan Jepang terhadap Tiongkok sebagai Negara <i>Rising Power</i>	44
BAB III PEMANFAATAN DIPLOMASI BUDAYA JEPANG UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL MELALUI <i>COOL JAPAN INITIATIVE</i> DI TIONGKOK	48
3.1 Diplomasi Budaya sebagai Alat untuk Memperluas Misi, Tujuan, dan Manfaat <i>Cool Japan Initiative</i>	49
3.2 Upaya <i>Cool Japan Initiative</i> sebagai Garda Terdepan Diplomasi Budaya Jepang	51
3.2.1 Mempromosikan Perkembangan Domestik	51
3.2.2 Menghubungkan Jepang dengan Negara Lain	54
3.2.3 Menjadi Jepang yang Membantu Dunia	61
BAB IV PENGARUH <i>COOL JAPAN INITIATIVE</i> DI TIONGKOK SELAMA SENKETA KEPULAUAN SENKAKU UNTUK MEMPERERAT HUBUNGAN DIPLOMATIK JEPANG-TIONGKOK	65
4.1 Peristiwa Sengketa Kepulauan Senkaku mempengaruhi Perubahan Kepemimpinan Jepang terhadap Tiongkok	66
4.1.1 Instrumentalis dan Sekuritisasi sebagai Logika Diskursif Internal Diplomasi Budaya Jepang melalui Pengaplikasian <i>Cool Japan Initiative</i>	67
4.1.2 Spasial, Keterarahan, dan Pembagian antara Publik atau Swasta sebagai Logika Diskursif Internal Diplomasi Budaya Jepang melalui Pengaplikasian <i>Cool Japan Initiative</i>	68
4.2 Andil Diplomasi Budaya melalui <i>Cool Japan Initiative</i> terhadap Hubungan Diplomatik Jepang-Tiongkok	70
4.2.1 Strategi Jepang melalui <i>Soft Power</i> untuk Memperkuat Efektivitas Diplomasi Budaya Jepang-Tiongkok	71

4.2.2 Pemanfaatan <i>Soft Power</i> sebagai Diplomasi Budaya Jepang untuk Mengubah Makna dan Tujuan <i>Cool Japan Initiative</i>	74
BAB V	
KESIMPULAN	82
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Siswa Internasional di Jepang menurut Kewarganegaraanya pada tahun 2017.....	79
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dinamika Hubungan Diplomatik Jepang-Tiongkok 2012-2018	37
Gambar 3.1 Skema Pertama <i>Cool Japan Initiative</i>	52
Gambar 3.2 Skema Kedua <i>Cool Japan Initiative</i>	55
Gambar 3.3 Perdana Menteri Jepang Shinzō Abe sebagai Super Mario	56
Gambar 3.4 Tangga Kuil Suga	59
Gambar 3.5 Skema Ketiga <i>Cool Japan Initiative</i>	61
Gambar 4.1 Perkembangan PDB Jepang dan Tiongkok 2012-2018	72

DAFTAR SINGKATAN

APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ASEAN	: <i>The Association of Southeast Asian Nations</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease</i>
DPJ	: <i>Democratic Party of Japan</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
FTAAP	: <i>Free-Trade Agreement of the Asia-Pacific</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDL	: Partai Demokrat Liberal
PKC	: Partai Komunis Cina
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
TPP	: <i>Trans-Pacific Partnership</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
JETRO	: <i>Japan External Trade Organization</i>
JNTO	: <i>Japan National Tourism Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara tidak dapat bertahan sendiri karena memiliki kepentingan masing-masing yang ingin dicapai. Kepentingan tersebut dapat dicapai melalui adanya kerja sama internasional dengan negara dan atau kawasan lainnya. Namun pada tatanan global dan politik modern, kerja sama internasional antara negara dan atau kawasan lainnya tidak selalu bersangkut paut dengan isu-isu konservatif yang didorong oleh strategi tradisional suatu negara sebagai reaksi terhadap ancaman militer. Isu-isu non-konservatif pada umumnya melingkupi budaya melalui pemberdayaan ekspresi kreatif yang dilandaskan atas dasar pertukaran ide, informasi, seni, dan individu demi meningkatkan rasa saling pengertian.¹

Istilah budaya memiliki sifat yang dinamis dan tidak ada batasannya. Pada umumnya, budaya yang dibawa oleh suatu negara tidak hanya dapat mengubah persepsi masyarakat domestik, melainkan juga masyarakat internasional. Diplomasi budaya merupakan salah satu alat yang digunakan oleh beberapa negara demi mencapai kepentingannya. Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang giat memanfaatkan diplomasi budaya agar kepentingannya dapat

¹ César Villanueva Rivas, *Representing Cultural Diplomacy: Soft Power, Cosmopolitan Constructivism and Nation Branding in Mexico and Sweden* (Växjö: Växjö University Press: 2007), 42, <http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:vxu-1683?tab2=abs&language=en>.

dicapai.² Budaya Jepang telah lama singgah di negara-negara lain khususnya kawasan Asia. Pada masa periode pendudukan dan penjajahan, Jepang mengkonstruksikan kebijakan budaya yang dilandaskan atas panji *Greater East Asia Co-Prosperity Sphere* dan pemahaman bahwa masyarakat Jepang perlu menerima posisi geopolitiknya yang dominan di Asia. Unsur budaya diperkuat Jepang dengan menggantikan pengaruh Barat dalam koloni-koloninya melalui budaya Jepang yang unggul. Namun, upaya tersebut kurang memiliki implementasi yang baik. Kekalahan Jepang dengan Amerika Serikat terhadap perang warisan kependudukan pada tahun 1945 sampai 1952 mengakibatkan Jepang untuk mengintegrasikan pendekatan yang baru dan meninggalkan imperialisme budaya.³

Selain itu, Jepang juga memanfaatkan gerakan konservasi yang dimulai pada era Meiji di tahun 1896-1912 sebagai pemberdayaan budaya. Hal tersebut Gerakan *haibutsu kishaku* muncul untuk menghilangkan Buddhisme dan Siddhartha Gautama dalam masyarakat Jepang demi memperkuat identitas nasionalnya.⁴ Kedua upaya tersebut melahirkan Jepang sebagai negara yang mengedepankan pelestarian budaya dan mengkonstruksikan peran pemerintahan untuk dengan membangun sekolah seni seperti *Tokyo School of Fine Arts* pada

² Patricia M. Goff, "Cultural Diplomacy," dalam *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, ed. Andrew F. Cooper, Jorge Heine, dan Ramesh Thakur, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 2, 10.1093/oxfordhb/9780199588862.013.0024.

³ Nizzim Kadosh Otmazgin, "Geopolitics and Soft Power: Japan's Cultural Policy and Cultural Diplomacy in Asia," *Asia-Pacific Review* 19, no. 1 (2012): 38, <http://dx.doi.org/10.1080/13439006.2012.678629>.

⁴ Natsuo Akagawa, *Heritage Conservation in Japan's Cultural Diplomacy: Heritage, National Identity, and National Interest*, (Oxon: Routledge, 2015), 47-48, <http://dx.doi.org/10.4324/9781315886664>.

tahun 1887 dan *Japan Institute of Fine Arts* pada tahun 1898.⁵ Namun, seiring dengan berkembangnya tatanan politik global modern, Jepang mulai masuk dalam transformasi fokus budaya.

Hal ini membawa Jepang untuk memanfaatkan budaya pop sebagai instrumen *soft power* dengan memanfaatkan *anime Doraemon*. *Doraemon* secara sah merupakan duta besar *anime* Jepang yang bertujuan untuk menggambarkan sisi positif Jepang melalui *anime*. Antusiasme Jepang untuk membuka peluang diplomasi budaya dengan negara dan atau kawasan lainnya dilaksanakan untuk mencapai kepentingannya.⁶ Sehingga, secara tidak langsung masyarakat internasional tidak hanya dipaparkan oleh siaran televisi dalam bentuk hiburan, melainkan juga budaya Jepang. Salah satu negara yang dipengaruhi dengan penyebaran budaya Jepang adalah Tiongkok.

Melalui budaya yang ditawarkan oleh Jepang, dukungan Tiongkok terhadap penyebaran tersebut dapat dilihat dari peningkatan hak *streaming* digital Tiongkok sebesar 79% terhadap *anime*, serta munculnya pameran dan acara yang berhubungan dengan *anime*. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya minat masyarakat Tiongkok terhadap budaya yang ditawarkan Jepang terlebih *anime*, sehingga menyebabkan pasar animasi Jepang pada tahun 2015 meningkat sebesar 12% dari tahun 2014 dan memperoleh 1.63 triliun Yen.⁷ Diplomasi

⁵ *Ibid*, 49.

⁶ Pemerintahan Jepang, Departemen Kebijakan Luar Negeri Jepang, Inauguration Ceremony of Anime Ambassador, (Tokyo: Departemen Kebijakan Luar Negeri Jepang, 2008), <http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/3/0319-3.html>.

⁷ Gerry Groot, "Cool Japan Versus The China Threat: Does Japan's Popular Culture Success Mean More Soft Power?," dalam *Japanese Language and Soft Power in Asia*, ed. Kayoko Hashimoto, (Adelaide: Palgrave Macmillan, 2018), 21, 10.1007/978-981-10-5086-2_2.

budaya secara empiris dapat mempengaruhi pariwisata dan meningkatkan keinginan turis untuk mengunjungi Jepang.⁸

Hubungan Jepang dengan Tiongkok bersifat lebih dinamis karena beberapa hal. Sebelum memasuki tahun 1949, hubungan Jepang dan Tiongkok ditandai melalui berkembangnya Dinasti Qing Tiongkok dan Meiji Jepang dengan kekuatan besar yang saling bertabrakan. Hubungan kedua negara semakin jauh ketika setelah Perang Pertama Sino-Jepang mengakibatkan adanya revisi perjanjian yang kurang adil dan pembentukan Jepang sebagai kerajaan kolonial atas Taiwan dan Pulau Penghu.⁹ Pada tahun 1970-an, kedua negara memiliki perubahan hubungan diplomatik karena diplomasi Jepang memprioritaskan terciptanya stabilitas terhadap Tiongkok. Kedua negara mengintegrasikan kuasi-pemerintahan dan hubungan pribadi, meskipun pada saat itu sedang mengalami tekanan internasional politik.¹⁰

Namun pada tahun 1990-an, hubungan kedua negara menurun. Insiden Tiananmen pada tahun 1989 dan akhir dari Perang Dingin mengakibatkan kedua negara untuk mengubah hubungan diplomatiknya. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa isu yang dialami kedua negara, salah satunya adalah konflik Taiwan yang dipengaruhi oleh politik dalam negara Jepang dan Tiongkok.¹¹ Kemudian, pada November 2013 Tiongkok dan Jepang kembali lagi mengalami konflik. Pada

⁸ Elizabeth Agyeiwaah, Wantanee Suntikul, dan Li Yee Shan Carmen, “‘Cool Japan’: Anime, Soft Power and Hong Kong Generation Y Travel to Japan,” *Journal of China Tourism Research*, (2018): 3, <https://doi.org/10.1080/19388160.2018.1540373>.

⁹ Ryosei Kokubun, Yoshihide Soeya, Akio Takahara, dan Shin Kawashima, *Japan-China Relations in the Modern Era*, (Oxon: Routledge, 2017), 2, <http://dx.doi.org/10.4324/9781315229058>.

¹⁰ *Ibid*, 83.

¹¹ *Ibid*, 132.

saat itu, Tiongkok dan Jepang sedang mengalami sengketa kepulauan Senkaku. Hal ini dipandang Jepang sebagai salah satu ancaman teritorial yang dapat mengganggu hubungan diplomasinya dengan Tiongkok.¹² Dengan demikian, diplomasi budaya bagi Jepang tidak hanya merupakan alat untuk mempromosikan budaya, melainkan juga untuk mempererat hubungan diplomatik. Diplomasi budaya merupakan alat untuk menyiapkan konfigurasi ulang terhadap kemungkinan strategis demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan Jepang.¹³

Meskipun terdapat beberapa penelitian yang seringkali mengkaji pembahasan isu politik antara Jepang dan Tiongkok, kurang dari penelitian tersebut menjelaskan kaitannya dengan diplomasi budaya. Jepang yang mengedepankan *soft power* sebagai garda terdepan diplomasinya dengan negara lain, merupakan sasaran yang tepat untuk perspektif diplomasi budaya. Diplomasi budaya memiliki fungsi dalam politik luar negeri untuk memperlihatkan pertukaran ide, informasi, seni dan aspek budaya lainnya yang terintegrasikan dalam setiap bangsa dan masyarakat.¹⁴ Melihat peluang tersebut, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang meluncurkan *Cool Japan Initiative* pada tahun 2012 sebagai pemberdayaan dan dukungan terhadap promosi *anime*, *manga*, drama televisi, film, novel, kuliner, gaya busana, gaya hidup, pariwisata, dan budaya permainan.¹⁵ Sehingga, melalui diplomasi budaya *Cool Japan*

¹² *Ibid*, 190.

¹³ Craig Hayden, *The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Contexts*, (Plymouth: Lexington Books, 2012), 79-80, https://books.google.co.id/books?id=vPYTvqf6fzsC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

¹⁴ César Villanueva Rivas, *loc.cit.*

¹⁵ Elizabeth Agyeiwaah, *op.cit.*, 2.

Initiative, Jepang memiliki harapan untuk tetap mempererat hubungannya dengan Tiongkok.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Jepang menggunakan *Cool Japan Initiative* sebagai salah satu diplomasi budaya yang dikedepankan demi mencapai misinya sebagai negara yang menyediakan solusi kreatif untuk tantangan dunia. Melalui program tersebut, Jepang berupaya untuk membuka kesempatan bagi negara, masyarakat di luar Jepang, dan industri budaya Jepang untuk ikut berkontribusi dalam *Cool Japan Initiative*.¹⁶ Dengan berkembangnya tatanan politik global modern, Jepang mengalami transformasi yang fokus terhadap pemanfaatan budaya. Transformasi tersebut membawa Jepang untuk mengedepankan pendekatan melalui diplomasi budaya yang erat dengan program latihan bahasa dan pertukaran budaya, serta pelayanan penyiaran internasional oleh *Nippon Hoso Kyokai*. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Jepang semakin sadar terhadap potensi budaya yang tidak hanya dimanfaatkan untuk pemulihan stagnasi ekonomi, melainkan juga untuk kebijakan luar negeri. Jepang sadar bahwa mereka unggul dalam pengaruh budaya pop, sehingga produk budaya seperti animasi khas Jepang (*anime*), komik

¹⁶ Pemerintahan Jepang, Kabinet Pemerintahan Jepang, *Cool Japan Proposal*, (Tokyo: Kabinet Pemerintahan Jepang, 2014), 6, https://www.cao.go.jp/cool_japan/english/pdf/published_document3.pdf.

khas Jepang (*manga*), drama televisi khas Jepang (*J-Drama*), dan mainan.¹⁷ Siaran televisi Jepang dalam bentuk *anime* seperti *Astro Boy*, *Speed Racer*, dan *Kimba* pada tahun 1960-an dan 1970-an merupakan hasil produk yang digemari oleh penonton non-Jepang. Ketiga *anime* tersebut memiliki konsep dan estetika yang tidak mengikutsertakan referensi-referensi khusus dan khas dari Jepang agar dapat diterima luas dan memperoleh penonton dari masyarakat internasional.¹⁸

Tiongkok sebagai salah satu negara *rising power* di Asia ikut turut dalam mendukung perkembangan *Cool Japan Initiative*, sehingga budaya Jepang tidak hanya dikenal oleh Tiongkok saja, melainkan oleh negara-negara di kawasan lainnya. Namun, selama rentang periode 2012 hingga 2018, *Cool Japan Initiative* menunjukkan bahwa Jepang kurang dikedepankan untuk menarik nilai-nilai politik atau moral penting, melainkan merujuk terhadap *nation-branding* dan pemasaran nasional.¹⁹ Dengan demikian, pengaruh *Cool Japan Initiative* terhadap Tiongkok dianggap sebagai kesempatan untuk tidak hanya meningkatkan kepentingan politiknya, melainkan juga untuk maksimalisasi keuntungan industri lokal. Produk yang dihasilkan oleh *Cool Japan Initiative* dianggap Tiongkok sebagai strategi perlindungan industri lokalnya atas dasar mekanisme *half-market*. Dalam konteks ini, Tiongkok menyediakan industri lokalnya dengan investasi secara langsung yang didukung secara politik.²⁰ Sehingga, fokus *Cool Japan*

¹⁷ Craig Hayden, *op.cit.*, 79.

¹⁸ Gerry Groot, *loc.cit.*

¹⁹ Gerry Groot, *op.cit.*, 17.

²⁰ Qi Wang, "The Dilemma of Japan's Cultural Diplomacy in China: A Case Study of Japanese Manga and Anime," (2007), 26, <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1325086>.

Initiative semakin bergeser dan mulai mengimplementasikan unsur-unsur lainnya untuk mempererat hubungannya dengan Tiongkok.

Anomali yang dianggap penulis menjadi penting terkait permasalahan tersebut adalah adanya pergeseran tujuan *Cool Japan Initiative*. Di atas kertas tertulis, *Cool Japan Initiative* merupakan program untuk membentuk kesiapan Jepang terhadap isu sosial baru yang diakibatkan oleh komunitas kapitalisme dalam tatanan politik global modern. Program tersebut secara khusus dilaksanakan secara bilateral dan multilateral demi menyediakan solusi kreatif bagi tantangan dunia. Namun dalam pengaplikasiannya, Jepang justru memanfaatkan program tersebut untuk mempererat hubungannya dengan Tiongkok di sela-sela kedua negara tersebut mengalami berbagai macam konflik yang kian meningkat, termasuk sengketa kepulauan Senkaku.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki rentang periode yang diawali pada tahun 2012 dan diakhiri pada tahun 2018. Penulis memutuskan untuk mengawali penelitian pada tahun 2012 karena tiga alasan. Pertama, tahun 2012 merupakan awal pembentukan strategi *Cool Japan Initiative* sebelum dicetuskan adanya *Cool Japan Fund Inc.* pada tahun 2013. Kedua, tahun 2012 merupakan situasi dan kondisi dimana menteri Tomomi Inada yang bertanggung jawab atas *Cool Japan Initiative* pertama kali dipilih. Ketiga, tahun 2012 merupakan awal masa pemerintahan Shinzo Abe untuk kedua kalinya menjabat sebagai Perdana Menteri

Jepang. Dengan tiga alasan tersebut, tingkat efektivitas *Cool Japan Initiative* dapat diukur dan dianalisis dengan baik oleh penulis. Selain itu, penulis memutuskan untuk mengakhiri penelitian pada tahun 2018 karena merupakan tahun terakhir sebelum pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) tersebar di kawasan Asia Timur.

Penulis memilih rentang periode tersebut karena rekonstruksi strategi dan kebijakan *Cool Japan Initiative* selama pandemi COVID-19 dinilai tidak relevan untuk diaplikasikan dalam penelitian. Transformasi pola perilaku terhadap penyebaran pandemi COVID-19 mempengaruhi Jepang untuk melaksanakan rekonstruksi strategi dan kebijakan *Cool Japan Initiative*. Perubahan digital dan pengaplikasian pekerjaan *remote* yang dipromosikan oleh suatu negara melalui pendidikan, perusahaan, dan instrumen-instrumen lainnya merupakan hasil dari transformasi pola perilaku tersebut.²¹ Dengan demikian, menurut hasil diskusi Jepang dengan para ahli, strategi dan kebijakan *Cool Japan Initiative* akan fokus setelah pandemi COVID-19 berakhir. Keputusan tersebut dinilai penulis tidak relevan untuk penelitian karena aktivitas *Cool Japan Initiative* setelah tahun 2018 kurang dapat dilaksanakan secara efektif. Sehingga, absennya pengaplikasian *Cool Japan Initiative* yang sesuai dengan tujuan utamanya dapat mengganggu penelitian.²²

²¹ Pemerintahan Jepang, 内閣府 知的財産戦略推進事務局, *CJ戦略における新型コロナウイルス感染症の影響調査分析*, 内閣府 知的財産戦略推進事務局, 2021, 4, https://www.cao.go.jp/cool_japan/report/pdf/impact.pdf.

²² *Ibid*, 20.

Selain itu, penulis juga membatasi jumlah aktor yang hanya melibatkan dua negara yaitu Jepang dengan Tiongkok, serta kabinet *Cool Japan Initiative* di bawah Jepang yang ikut serta dalam mempengaruhi Tiongkok melalui diplomasi budaya. Sehingga, *Cool Japan Initiative* merupakan aktor utama dalam penelitian ini. Dalam rangka menciptakan penelitian yang komprehensif, penulis juga membatasi isi pembahasan yang hanya terdiri atas implementasi *Cool Japan Initiative* oleh Jepang sebagai instrumen diplomasi budaya dan pengaruhnya di Tiongkok. Hal tersebut perlu dibatasi karena topik pembahasan penelitian terbatas untuk menganalisis tentang pemanfaatan diplomasi budaya Jepang melalui *Cool Japan Initiative* dan pengaruhnya di Tiongkok. Dengan demikian, penulis memberikan pemaparan komprehensif dengan tidak mengimplementasikan unsur lainnya yang kurang relevan dan kurang dapat mendukung penulisan penelitian.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh penulis melalui penjabaran latar belakang masalah dan identifikasi masalah, penulis telah merumuskan pertanyaan penelitian yaitu, **“Bagaimana diplomasi budaya Jepang melalui *Cool Japan Initiative* mempengaruhi hubungan diplomatik Jepang dan Tiongkok selama sengketa Kepulauan Senkaku?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensi sebenarnya Jepang melalui *Cool Japan Initiative* dan pengaruhnya di Tiongkok dengan jenjang periode diawali dari tahun 2012 dan diakhiri pada tahun 2018. Tulisan ini juga bertujuan untuk menunjukkan sudut pandang Jepang melalui pemaparan komprehensif terkait misi dan tujuan *Cool Japan Initiative* dan pengaruhnya di Tiongkok, serta dari sudut pandang Tiongkok melalui dampak yang diperoleh melalui program tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan agar dapat menunjukkan bahwa pengaruh diplomasi tidak hanya dapat diimplementasikan dalam diplomasi tradisional, melainkan juga melalui diplomasi budaya yang secara khusus dimanfaatkan Jepang untuk meningkatkan hubungan bilateral dan atau multilateral dengan pihak lain.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pandangan dan pemahaman baru terkait penggunaan diplomasi budaya selama tahun 2012 hingga 2018 sebagai instrumen untuk meningkatkan hubungan internasional dengan pihak lain melalui kasus diplomasi budaya Jepang melalui *Cool Japan Initiative* dan pengaruhnya di Tiongkok selama sengketa kepulauan Senkaku. Dalam hal ini, penulis berharap melalui penelitian ini dapat melihat bagaimana Jepang sebagai salah satu negara yang mengedepankan diplomasi budaya, mengimplementasikan

program berbasis budaya untuk meningkatkan hubungannya dengan Tiongkok walaupun selama periode tersebut, kedua negara sedang mengalami sengketa kepulauan Senkaku.

1.4 Kajian Literatur

Dalam rangka menciptakan penelitian yang baik terkait diplomasi budaya Jepang melalui *Cool Japan Initiative* dan pengaruhnya di Tiongkok selama sengketa kepulauan Senkaku, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai kajian topik tersebut.

Artikel jurnal *Effects of Cultural Institutes on Bilateral Trade and FDI Flows: Cultural Diplomacy or Economic Altruism?* oleh Firat Demir dan Hyeonjin Im menjelaskan tentang interkoneksi antara pengakuan bahasa dan budaya suatu negara dengan peningkatan hubungan bilateral ekonomi. Penggunaan bahasa dan budaya dianggap sebagai salah satu instrumen strategis untuk penetrasi ekonomi dengan memanfaatkan *soft power* melalui pengaruh politik dan budaya suatu negara.²³ Pengaruh pemanfaatan institusi budaya terhadap perdagangan bilateral dinilai dari delapan negara termasuk Jepang, dan Tiongkok sebagai negara maju. Negara-negara maju dinilai memiliki tingkat efektivitas untuk memanfaatkan *soft power* demi meningkatkan hubungan

²³ Firat Demir dan Hyeonjin Im, "Effects of Cultural Institutes on Bilateral Trade and FDI Flows: Cultural Diplomacy or Economic Altruism?," *The World Economy* 43, no.9 (2019): 2, 10.1111/twec.12906.

bilateral ekonomi yang lebih baik daripada negara-negara berkembang. Hal ini dapat terjadi karena secara lintas negara, persebaran institusi budaya tidak bersifat homogen. Sehingga, penggunaan bahasa dan budaya menghasilkan dampak positif secara berkala..²⁴

Artikel jurnal *Cool, Warm, Soft and Sharp: Paradigms of Cultural Exchange in Japan-China Relations* oleh Utpal Vyas menjelaskan tentang fondasi pertukaran budaya berdasarkan pertukaran dan alur terhadap informasi dan ide dibawah konteks kerja sama, serta di bawah kondisi dengan tingkat kooperatif yang kurang. Pemahaman tersebut digunakan untuk menjelaskan alasan dibalik perubahan pertukaran budaya Jepang dan Tiongkok setelah terbukanya kembali hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1972.²⁵ Pertukaran budaya tersebut dianggap positif karena stabilitas hubungan ekonomi strategis terhadap kedua negara kian meningkat, meskipun sedang di bawah tekanan sengketa kepulauan Senkaku. Sehingga, terjalannya hubungan tersebut dapat membuka kembali *soft power* Jepang untuk berdampak terhadap Tiongkok dan mempengaruhi kedua negara untuk saling mengimplementasikan pertukaran budaya.²⁶

Artikel jurnal *Repackaging National Identity: Cool Japan and the Resilience of Japanese Identity Narratives* oleh Taku Tamaki menjelaskan tentang tendensi strategi Jepang untuk mempromosikan produk lokal sejak administrasi

²⁴ *Ibid*, 3-4.

²⁵ Utpal Vyas, "Cool, Warm, Soft and Sharp: Paradigms of Cultural Exchange in Japan-China Relations," *International Journal of Cultural Policy* 26, no. 7 (2020): 2, <https://doi.org/10.1080/10286632.2020.1752683>.

²⁶ *Ibid*, 11-12.

Koizumi, lalu melanjutkan strategi tersebut dengan mengimplementasikannya selama tahun 2012 hingga 2018 melalui *Cool Japan Initiative* demi membentuk citra Jepang sebagai negara yang unik.²⁷ Dalam konteks ini, narasi aktor politik yang bertanggung jawab terhadap *Cool Japan Initiative* dinilai kurang memiliki gambaran jelas terkait *Cool Japan Initiative*. Pergeseran tujuan *Cool Japan Initiative* dapat dilihat dari kecenderungan aktor politik untuk lebih memperhatikan aspek ekonomi dan *nation branding* Jepang.²⁸ Dengan demikian, meskipun *Cool Japan Initiative* tetap dimanfaatkan Jepang untuk melakukan aktivitas diplomasi publik, *Cool Japan Initiative* dinilai kurang memiliki fokus karena menempatkan posisinya berada di antara pemberdayaan ekonomi dan budaya.²⁹

Artikel jurnal *Traversing the Soft/Hard Power Binary: the Case of the Sino-Japanese Territorial Dispute* oleh Linus Hagström dan Chengxin Pan menjelaskan tentang penggunaan *soft power* (*representational force*) dan *hard power* (*physical force*) di studi hubungan internasional yang saling berkaitan dan tidak bersifat non-biner. *Soft power* dan *hard power* dalam kasus sengketa kepulauan Senkaku antara Jepang dan Tiongkok dianggap memiliki peran performatif, sehingga menciptakan adanya konstruksi diskursif diantara keduanya.

²⁷ Taku Tamaki, "Repackaging National Identity: Cool Japan and the Resilience of Japanese Identity Narratives," *Asian Journal of Political Science* 27, no. 1 (2019): 1-2, <https://doi.org/10.1080/02185377.2019.1594323>.

²⁸ *Ibid*, 2.

²⁹ *Ibid*, 15-16.

³⁰ Melalui penggunaan *soft power* sebagai langkah pertama dapat melegitimasi dan mempersilahkan *hard power* untuk bekerja.³¹ Sehingga, citra sengketa kepulauan Senkaku yang pada umumnya dilihat sebagai kasus *hard power* dianggap sebagai pemahaman yang kurang benar.³² Pemahaman tersebut dinilai kurang benar karena sengketa kepulauan Senkaku dapat berjalan karena adanya *soft power* dan *hard power* yang saling berhubungan.³³

Menurut keempat kajian literatur yang penulis telah ringkas, diplomasi budaya Jepang membawa pengaruh besar dalam komunitas internasional. Namun, terdapat perbedaan pendapat mencolok antara satu literatur dengan yang lainnya. Di satu sisi, diplomasi budaya Jepang seperti *Cool Japan Initiative* dianggap sebagai saluran budaya positif dan berpengaruh terhadap Tiongkok sebagai respon atas keberhasilan diplomasi budaya Jepang di tatanan politik global modern. Sedangkan di sisi lainnya, *Cool Japan Initiative* dianggap merupakan kegagalan strategi diplomasi budaya Jepang akibat adanya pergeseran makna dan tujuan, sehingga mengakibatkan beberapa tantangan yang kian mendorong *Cool Japan Initiative* untuk menemukan jalan buntu dan mempersulit kasus sengketa kepulauan Senkaku antara Jepang dan Tiongkok. Dengan demikian, dalam konteks hubungannya dengan Tiongkok sebagai salah satu negara *rising power*, Jepang tidak hanya mengalami ancaman secara regional, melainkan juga secara

³⁰ Linus Hagström dan Chengxin Pan, "Traversing the Soft/Hard Power Binary: the Case of the Sino-Japanese Territorial Dispute," *Review of International Studies* 46, no. 1 (2019): 37-39, doi:10.1017/S0260210519000251.

³¹ *Ibid*, 55.

³² *Ibid*, 38.

³³ *Ibid*, 47.

lokal. Hal ini dapat dilihat dari inkonsistensi Jepang dalam mengembangkan budaya populernya melalui *Cool Japan Initiative* yang memiliki pergeseran makna dan tujuan. Maka, penulis melihat bahwa pemanfaatan diplomasi budaya oleh Jepang terhadap Tiongkok memiliki misi, tujuan, dan manfaatnya sendiri yang cenderung berpihak terhadap Jepang dan bukan secara mutual, namun secara tidak langsung mengakibatkan adanya dampak positif terhadap hubungan diplomatik kedua negara di bawah tekanan sengketa kepulauan Senkaku.

1.5 Kerangka Pemikiran

Konsep diplomasi budaya yang merupakan teori turunan (*middle range theory*) dari teori diplomasi publik dan teori diplomatik (*grand theory*). Teori diplomatik tidak semata-mata hanya tentang melobi, tawar-menawar, dan mendengarkan secara tersirat suatu negara, melainkan dengan menyelesaikan tugas-tugasnya melalui maksimalisasi pembudayaan dan modernisasi akan perilaku umum suatu negara.³⁴ Dengan demikian, tercipta adanya transaksi secara jujur yang perlu dipertahankan oleh suatu negara. Diplomasi dibutuhkan demi pemeliharaan perdamaian sebagai prioritas tinggi suatu negara. Pemeliharaan perdamaian tersebut dapat tercipta melalui protokol diplomasi yang perlu

³⁴ G. R. Berridge, Maurice Keens-Soper, dan T. G. Otte, *Diplomatic Theory from Machiavelli to Kissinger* (New York: Palgrave Macmillan, 2001), 5, <https://www.palgrave.com/gp/book/9780333753651>.

dipelajari dan diikuti dengan baik agar dapat membantu melindungi dan meredakan hubungan antara negara.³⁵

Teori diplomasi publik bukan merupakan diplomasi tradisional yang pada umumnya terdiri atas interaksi antara pemerintahan untuk meningkatkan kepentingan nasional, melainkan merupakan representatif suatu pemerintahan untuk menargetkan sektor asing publik demi mengembangkan dukungan untuk tujuan strategis yang serupa.³⁶ Interaksi antara pemerintahan tersebut beroperasi sebagai agensi informasi dimana komunikasi, hubungan masyarakat, dan citra publik suatu negara dapat dinilai dan disebarluaskan meskipun dalam bentuk komersial atau propaganda. Secara khusus, teori diplomasi publik merupakan agen untuk memberikan pesan pemerintahan yang berhubungan dengan suatu negara, serta pada umumnya digunakan sebagai taktik politik defensif-ofensif terhadap propaganda dan stereotip.³⁷

Sehingga, terdapat dua pendekatan yang dibawa oleh teori diplomasi publik, yakni *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* merupakan pembawaan representatif pemerintahan yang menggunakan pandangan pragmatis dan instrumental. Sedangkan, pendekatan *bottom-up* merupakan pembawaan representatif pemerintahan yang menggunakan tradisi demokratis idealis. Kedua pendekatan tersebut merupakan representatif pemerintahan terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Secara umum, teori diplomasi budaya menurut Milton C.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ César Villanueva Rivas, *op.cit.*, 46.

³⁷ César Villanueva Rivas, *op.cit.*, 47-48.

Cummings merujuk kepada pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek budaya lainnya di setiap bangsa-bangsa dan masyarakat demi menciptakan saling pengertian.³⁸ Berbeda dengan teori diplomasi publik, teori diplomasi budaya lebih memperhatikan dalam perspektif jangka panjang dengan mekanisme bekerja identitas suatu individu secara diskursif, agar dapat dikonstruksi dan direpresentasikan.³⁹

Terdapat lima kunci utama dari logika diskursif internal yang dikemukakan oleh teori diplomasi budaya, yakni instrumentalitas (*instrumentality*), sekuritisasi (*security*), spasial (*spatiality*), keterarahan (*directionality*), dan pembagian antara publik atau swasta (*public or private divide*). Kelima kunci utama tersebut dilandaskan atas tiga *articulation of discourse*, yakni *soft power*, *nation-branding*, dan *cosmopolitan cosmopolitan*. Sesuai dengan urutan lima kunci utama dari logika diskursif internal, instrumentalitas dapat dilihat sebagai pemasaran, kekuatan, dan budaya di suatu negara. Instrumentalis merupakan “pivotal” terhadap pemahaman bagaimana diplomasi budaya dibentuk dan mengkonstruksikan subjek melalui otoritas teknis dan rezim kebenaran.⁴⁰ Sekuritisasi merupakan alat untuk melindungi budaya nasional dari pengaruh luar seperti propaganda, akibat yang dibawa oleh meluapnya komunikasi, dan atau migrasi. Sehingga, sekuritisasi perlu dimanfaatkan untuk mengorganisir program kebijakan luar negeri demi

³⁸ César Villanueva Rivas, *op.cit.*, 42-46.

³⁹ César Villanueva Rivas, *op.cit.*, 47.

⁴⁰ César Villanueva Rivas, *op.cit.*, 36-38.

mengembangkan budaya nasional ke bangsa lainnya melalui bahasa, tradisi, dan pandangan lokal terhadap suatu komunitas.⁴¹

Spasial merupakan istilah inspiratif dari pendapat Katzenstein terkait diplomasi budaya Jepang yang bermuka dua dengan pendekatan ke dalam dan ke luar. Kedua pendekatan tersebut menciptakan adanya fondasi atau infrastruktur yang menarik perhatian dunia internasional untuk ke Jepang, sekaligus untuk memproyeksikan budaya Jepang di luar negeri. Sehingga, spasial dalam teori diplomasi budaya terutama beroperasi di wilayah regional oleh industri-industri budaya dengan logika internasional agar dapat mencapai adanya kecenderungan untuk ekspansif secara global.⁴² Keterarahan dapat dibagi menjadi diplomasi budaya yang satu arah (*unidirectional*), dua arah (*bidirectional*), mutualisme (*retro-directional*), dan pluralitas (*multi-directional*). Diplomasi budaya satu arah merujuk terhadap proyek sepihak dari suatu identitas budaya luar negeri atau bangsa, *bidirectional* menyiratkan adanya timbal balik kedua pihak, *retro-directional* merupakan kebijakan yang dikonstruksikan oleh dua negara, dan *multi-directional* dengan pendekatan diplomatik multilateral demi kepentingan bersama.⁴³

Sedangkan, pembagian antara publik dan swasta merupakan pendekatan diplomasi budaya suatu negara untuk mencapai kepentingannya melalui pemahaman objek konsumsi dalam mentalitas pasar yang dibangun melalui kerja

⁴¹ César Villanueva Rivas, *op.cit.*, 41-42.

⁴² *Ibid.*

⁴³ César Villanueva Rivas, *op.cit.*, 43.

sama dengan perusahaan dan yayasan. Kelima fitur tersebut merupakan akar dari teori diplomasi budaya yang dilandaskan atas dasar *soft power*, *nation-branding*, dan atau konstruktivisme kosmopolitan.⁴⁴ Melalui tiga turunan teori diplomasi budaya tersebut, penulis menggunakan teori *soft power* untuk mengkaji penelitian ini. *Soft power* merupakan wajah kedua kekuatan dengan menggunakan metode tidak langsung seperti mengkooptasi target untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. *Soft power* memiliki kapabilitas untuk membentuk preferensi suatu aktor melalui kekuatan daya tarik. Pada umumnya, kekuatan daya tarik suatu aktor dijalankan bersama aset tidak berwujud lainnya seperti institusi dan nilai politik, serta kebijakan yang dianggap sah atau memiliki otoritas moral.⁴⁵

Sehingga, jika nilai-nilai masyarakat direpresentasikan oleh pemimpin negaranya, biaya suatu negara untuk memimpin negaranya rendah. *Co-optive power* digunakan *soft power* untuk membentuk keinginan suatu aktor melalui kekuatan daya tarik budaya dan nilai-nilainya, agar dapat memanipulasi agenda keputusan politik. Sehingga, terdapat dua variabel *co-optive power* yang digunakan dalam teori *soft power*, yakni: (1) kekuatan daya tarik, dan (2) *agenda setting*.⁴⁶ Berbeda dengan teori diplomasi publik, teori diplomasi budaya lebih memperhatikan dalam perspektif jangka panjang dengan mekanisme bekerja identitas suatu individu secara diskursif, agar dapat dikonstruksi dan

⁴⁴ César Villanueva Rivas, *op.cit.*, 44.

⁴⁵ Joseph S. Nye, Jr, *Soft Power the Means to Success in World Politics*, (New York: PublicAffairs, 2004), 5-6.

⁴⁶ *Ibid*, 6-9.

direpresentasikan.⁴⁷ Sehingga, secara tidak langsung *soft power* mengesahkan dan membuka akses bagi *hard power* untuk terjadi.⁴⁸ Melalui pemaparan komprehensif tentang diplomasi budaya, penulis berpendapat bahwa teori tersebut tepat dengan topik penelitian. Kecenderungan Jepang untuk memanfaatkan *soft power* sebagai salah satu garda terdepan kebijakan dan aktivitas luar negeri, pada umumnya dapat diidentifikasi sebagai diplomasi budaya. Dengan demikian, konsep diplomasi budaya dan teori *soft power* dapat menunjang penelitian penulis agar isi pembahasan tidak hanya bernuansa secara empiris, melainkan juga dilandaskan atas dasar teori hubungan internasional.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan teknik penelitian sistematis dan intuitif dalam rangka menghasilkan pengetahuan melalui pendekatan yang koheren dan efisien.⁴⁹ Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan penelitian yang dilandaskan atas dasar penalaran induktif dari pengamatan empiris berbasis internet.⁵⁰ Melalui pemahaman tersebut, metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis untuk lebih menganalisis makna dan pemahaman daripada kuantifikasi dalam isu yang dikaji penulis. Tujuan metode penelitian kualitatif

⁴⁷ César Villanueva Rivas, *op.cit.*, 47.

⁴⁸ Linus Hagström dan Chengxin Pan, *op.cit.*, 38.

⁴⁹ Umar Suryadi Bakry, *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 62.

⁵⁰ *Ibid*, 64-67.

menekankan pada pemahaman terkait fenomena, aktivitas, dan proses sosial agar dapat memperoleh pengetahuan mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan sejarah suatu individu dalam hubungannya dengan perspektif responden melalui pemanfaatan metode semi-terstruktur dan konteks-sensitif, kaya data, serta penjelasan makna, cara, dan alasan pengajuan pertanyaan.⁵¹ Penulis menganggap bahwa metode penelitian kualitatif tepat untuk digunakan dalam penelitian karena tujuan dari metode penelitian kualitatif selaras dengan penelitian penulis, yakni untuk memiliki pemahaman suatu konteks yang alami (*natural setting*) yang terjadi dalam proses penelitian.⁵²

Dalam rangka menciptakan penelitian yang mendalam, komprehensif, dan spesifik, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus untuk memperkaya kajian penelitian. Studi kasus merupakan investigasi secara mendalam dengan mengumpulkan berbagai macam informasi dan untuk melaksanakan observasi terhadap suatu isu. Melalui investigasi secara mendalam, suatu penelitian dianalisis melalui bahan-bahan empiris dan bagaimana mekanisme mereka bekerja, sehingga muncul dalam bentuk-bentuk spesifik yang datang dari perspektif sosiologis.⁵³ Studi kasus dapat menggambarkan masalah dalam aspek literatur, bahasa, dan sosiologi di bawah bidang ilmu sosial. Masalah yang dianalisis oleh metode penelitian studi kasus dapat memberikan deskripsi

⁵¹ *Ibid*, 62-63.

⁵² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Cakra Books, 2014), 4, <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>.

⁵³ Jacques Hamel, Stephane Dufour, dan Dominic Fortin, *Case Study Methods*, (California: SAGE Publications, 1993), 45-46.

mendalam dan pemahaman melalui aktivitas suatu bahasa terhadap bahan-bahan empiris dapat dibentuk dalam bahasa sosiologis.⁵⁴ Penulis memutuskan untuk menggunakan studi kasus karena dapat menghasilkan informasi baru yang bukan merupakan pernyataan ulang informasi-informasi yang dikumpulkan, sehingga dapat menghasilkan penelitian baru atas dasar perspektif sosiologis.⁵⁵ Dengan demikian, melalui penggunaan studi kasus sebagai metode penelitian kualitatif dapat mendukung kajian penelitian agar bersifat mendalam, komprehensif, dan spesifik.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka dengan penelitian berbasis dokumen dan internet. Penelitian berbasis dokumen pada umumnya memiliki sumber dari dokumen-dokumen kajian informasi fenomena sosial dengan tindakan peneliti yang bersifat independen. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu, dokumen sekunder (*secondary document*), dan dokumen resmi.⁵⁶ Pertama, dokumen sekunder merupakan dokumen kepemilikan suatu individu dengan akses informasi dan peristiwa yang diperoleh tidak langsung seperti melalui wawancara saksi mata atau dari dokumen primer. Ketiga, dokumen resmi merupakan dokumen yang dipublikasikan oleh pihak resmi seperti negara, media, kelompok bisnis, atau organisasi dalam bentuk transkrip pidato atau wawancara, laporan

⁵⁴ *Ibid*, 46-47.

⁵⁵ *Ibid*, 48.

⁵⁶ Farida Nugrahani, *op.cit.*, 171-172.

penelitian, memorandum, pernyataan suatu kebijakan, dan lain-lain. Selain penggunaan metode berbasis dokumen, penulis memanfaatkan teknik pengumpulan data berbasis internet agar dokumen-dokumen tersebut dapat diperoleh. Melalui metode berbasis internet, penulis dapat mengakses artikel jurnal, buku, dan dokumen penting lainnya yang dapat ikut turut membantu penelitian.⁵⁷

Sehingga, penulis menggunakan jenis data sekunder sebagai sumber utama dalam melaksanakan penelitian ini. Data sekunder menggunakan data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti untuk mengkaji penelitiannya. Selain itu, penulis juga memanfaatkan data statistik yang disediakan oleh instansi-instansi pemerintah. Melalui pemahaman tersebut, penulis menggunakan data karena dapat menghemat waktu dan biaya, kualitas data tinggi, dan memiliki peluang analisis data longitudinal.⁵⁸ Tujuan dari penelitian data sekunder adalah untuk menggambarkan analisis melalui data yang sudah tersedia dan terkumpul sebelumnya. Sehingga, penulis menganggap bahwa teknik pengumpulan data sekunder adalah tepat karena penulis dapat secara komprehensif dan sistematis berdasarkan pengetahuan resmi menjelaskan penelitian tanpa harus melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh langsung agar dapat menekan waktu dan biaya.⁵⁹

⁵⁷ Farida Nugrahani, *op.cit.*, 171-175.

⁵⁸ Farida Nugrahani, *op.cit.*, 199-203.

⁵⁹ Farida Nugrahani, *op.cit.*, 200-201.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian penulis dibagi menjadi empat bab yang terdiri atas empat bab. Bab I merupakan bagian pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang terdiri atas deskripsi, pembatasan, dan perumusan masalah. Kemudian, penulis menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, serta teori-teori yang penulis gunakan demi menciptakan penelitian yang berbasis pada pengetahuan. Selanjutnya, penulis memaparkan metode penelitian dan teknik pengumpulan data agar penelitian penulis dapat diolah secara bertahap dan sistematis. Setelah seluruh sub-bab tersebut, penulis mengakhiri bab I pendahuluan dengan sistematika pembahasan yang terdiri atas rincian penelitian di setiap bab dalam penelitian penulis.

Bab II merupakan bagian yang membahas tentang isi analisis penelitian penulis. Pada bab ini, penulis membahas tentang pemanfaatan diplomasi budaya oleh Jepang melalui *Cool Japan Initiative* terhadap Tiongkok. Dalam bagian ini, penulis mengelaborasi bahwa *Cool Japan Initiative* merupakan keputusan tepat Jepang untuk menggunakannya sebagai garda terdepan diplomasi budaya, serta Tiongkok sebagai target yang tepat untuk memperluas misi, tujuan, dan manfaat *Cool Japan Initiative* secara internasional. Selain itu, penulis juga menerapkan konsep diplomasi budaya agar penelitian bersifat komprehensif dan empiris.

Bab III, sama dengan bab II merupakan bagian yang membahas isi analisis penelitian penulis. Pada bab ini, penulis membahas tentang pengaruh *Cool Japan*

Initiative di Tiongkok dan bagaimana Jepang sebenarnya memanfaatkan program tersebut untuk mempererat hubungannya dengan salah satu negara *rising power* di Asia yaitu Tiongkok. Selain itu, penulis mengelaborasi pandangan Tiongkok terhadap *Cool Japan Initiative* dan respon terhadap transisi misi, tujuan, dan manfaat *Cool Japan Initiative* selama sengketa kepulauan Senkaku disertai dengan teori diplomasi budaya agar penelitian yang komprehensif dan empiris dapat tercapai.

Bab IV merupakan bagian terakhir dari segala rangkaian penelitian. Pada bab ini, penulis mengelaborasi hasil penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, penulis juga menjelaskan kontribusi yang diperoleh dari penelitian terhadap studi Ilmu Hubungan Internasional, serta saran yang bermanfaat bagi skripsi dan penelitian lebih lanjut.